

**ADAPTASI STRUKTUR KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN PETERNAK
DALAM BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETTAWA (PE) DI PURWOREJO**

✉ Tatag Handaka¹, Hermin Indah Wahyuni², Endang Sulastri², Paulus Wiryono²

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIB-Universitas Trunojoyo Madura

²Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP), Sekolah Pascasarjana
(SPs.)-Universitas Gadjah Mada

Received: 27 Oktober 2016; Accepted: 31 Oktober 2017; Published: 11 November 2017

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1909>

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis adaptasi yang dikembangkan sistem komunikasi Pemerintah dan peternak. Teori yang digunakan adalah teori sistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Populasi penelitian di Kabupaten Purworejo yang menjadi sentra budidaya kambing Peranakan Ettawa (PE). Informan penelitian adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPPKP), Ketua Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), Kepala Bidang Peternakan DPPKP, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani, dan Peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi Pemerintah dijalankan oleh struktur komunikasi yang ada di KJF dan BPK. Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE berevolusi menjadi sistem yang tidak adaptif. Sistem komunikasi peternak dikembangkan oleh struktur kelompok tani (poktan). Sistem komunikasi peternak dalam menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE berevolusi menjadi sistem adaptif.

Kata Kunci: Adaptasi, Sistem Komunikasi Pemerintah, Sistem Komunikasi Peternak, Budidaya Kambing PE

**ADAPTATION OF GOVERNMENT AND FARMER COMMUNICATION SYSTEMS IN
ETTAWA CROSSBREED GOAT FARMING IN PURWOREJO REGENCY**

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze the adaptation process that was developed by government and farmer communication systems. The theory used was communication system by Niklas Luhman's perspective. The research method used was ethnography. Population of this study was conducted in Purworejo regency as the center of Ettawa Crossbreed (EC) goat farming. Informants of the study are: Head of the Agricultural, Livestock, Marine and Fisheries Offices, Head of Functional Group, Head of Livestock Affairs, Coordinator of Center for Agricultural Extension, extension staff, head of farmer groups, and farmers. The result of the study showed that government communication system was developed by Functional Group (KJF) which is under the Agricultural, Livestock, Marine and Fisheries Offices (DPPKP) and Center for Agricultural Extension (BPK) located in the subdistrict. Government communication system in encountering the environmental complexity of EC goat farming evolved into a system that was not adaptive. On the other hand, farmer communication system was developed by farmer groups (poktan). Farmer communication system encountering environmental complexity of EC goat farming evolved into an adaptive system.

Keywords: adaptation, government communication system, farmer communication system, EC goat farming
Keywords: Income, Motivation, Labelled Eggs.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan
Email : tataghandaka@gmail.com
Phone : +6281380249173

PENDAHULUAN

Eksistensi kambing PE di Indonesia terutama di daerah pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pesisir utara Jawa Barat telah berkembang dengan baik dan dapat diterima cukup luas di masyarakat. Hal ini mengingat kemampuan produksi kambing PE yang cukup tinggi sebagai penghasil daging dan susu (*dual purpose*). Pemeliharaan kambing PE sebagai ternak penghasil daging dan susu memiliki potensi yang cukup tinggi, karena memiliki kemampuan adaptasi yang luas, yaitu dari daerah tropis hingga sub tropis sehingga mampu beradaptasi dengan baik terhadap iklim yang ada di Indonesia (Heriyadi, 2004).

Salah satu sentra peternakan kambing PE di Provinsi Jawa Tengah yang cukup baik dan cukup terkenal, yaitu Unit Pembibitan Ternak kambing PE yang terletak di Desa Kalilo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Populasi kambing PE di UPT Kaligesing pada tahun 2004 adalah sekitar 200 ekor, sedangkan populasi kambing PE di Kecamatan Kaligesing mencapai 40.313 ekor dan merupakan sentra pengembangan kambing PE dengan populasi terbesar di Indonesia (DP- PKP Kabupaten Purworejo, 2012).

Populasi kambing PE di Purworejo yang dibudidayakan peternak menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Jumlah kambing PE berjumlah 43.769 ekor pada tahun 2001. Kemudian meningkat menjadi 45.811 ekor (2002), 50.579 ekor (2003), 58.463 ekor (2004), 59.000 ekor (2005), 60.808 ekor (2006), 65.983 ekor (2007), terus berkembang menjadi 67.165 ekor (2008), 68.894 ekor (2011), 75.666 (2012), dan bertambah menjadi 76.423 pada tahun 2013 (Laporan DPPKP Kabupaten Purworejo, 2014).

Sejarah panjang budidaya kambing PE ini tentu tidak bisa dipisahkan dari sistem komunikasi Pemerintah dalam penyuluhan dan sistem komunikasi peternak. Sistem komunikasi yang meliputi produksi informasi, umpan balik (*feedback*) dan reproduksi informasi. Sistem komunikasi yang dijalankan oleh Pemerintah maupun peternak memiliki mekanisme yang kurang

lebih sama seperti ini.

Sistem komunikasi Pemerintah dan peternak sama-sama menghadapi kompleksitas berupa persoalan tuntutan dan tantangan lingkungan. Sistem komunikasi Pemerintah dan peternak tidak bisa menyelesaikan seluruh kompleksitas lingkungan yang ada di luar dirinya. Sistem komunikasi memilih dan menyeleksi persoalan yang benar-benar menjadi kebutuhannya. Sistem komunikasi akan mengambil beberapa informasi dari lingkungan untuk digunakan menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan. Masing-masing sistem memiliki mekanisme/strategi sendiri dalam menghadapi tekanan kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE yang dinamis.

Kompleksitas lingkungan inilah yang menuntut sistem komunikasi Pemerintah dan peternak untuk selalu beradaptasi dengannya. Latar belakang ini membawa pada rumusan masalah berikut, *pertama*, bagaimana proses adaptasi yang dikembangkan sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE? *Kedua*, bagaimana proses adaptasi yang dikembangkan sistem komunikasi peternak dalam menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann. Ia mendefinisikan komunikasi secara eksplisit sebagai kesatuan informasi, pesan dan pemahaman (Leydesdorff, 2000; Hagen, 2000; von Groddeck, 2011). Sistem komunikasi bersifat tertutup (Luhmann, 2002); sekaligus bersifat terbuka (Luhmann, 1992).

Sistem komunikasi memiliki batas-batas (King & Thornhill, 2006; Rasch & Knodt 1994), ia harus membatasi diri agar tidak lebih kompleks dari lingkungannya. Sistem komunikasi dituntut mereduksi kompleksitas lingkungan. Karena lingkungan selalu lebih kompleks dari sistem itu sendiri (Luhmann, 1995; Stichweh, 2000). Sistem komunikasi adalah mekanisme sistem untuk memproduksi elemen-elemen yang dibutuhkannya. Sistem yang meng-

hadapi tantangan dan tuntutan dari lingkungan, akan mengambil informasi di luar dirinya untuk diproduksi sebagai strategi mengatasi persoalan (Ritzer, 2012; Littlejohn & Foss, 2008).

Sistem merupakan reduksi kompleksitas dari lingkungannya. Sistem dan lingkungan berada dalam wilayah/horizon dunia. Luhmann mengatakan, karena sistem berada dalam masyarakat, dan masyarakat adalah komunikasi (Lee, 2000; Fuchs, 1999; Viskovatoff, 1999). Sistem akan membedakan diri dengan sistem yang lain dan sekaligus membedakan diri dengan lingkungannya. Sistem komunikasi ada dalam masyarakat (Hardiman, 2008; Sitorus, 2008). Lingkungan sistem terdiri dari komunikasi (Littlejohn & Foss, 2009).

Penelitian tentang sistem pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian tentang sistem dinamis rantai pasok industrialisasi gula berkelanjutan di pulau Madura (Mahbubi, dkk., 2015). Penelitian sistem yang berkaitan dengan keragaan usaha tani dan pemasaran buah naga organik (Ningsih, dkk., 2015). Penelitian sistem yang berkaitan dengan revitalisasi sumber daya manusia Polri dalam *integrating criminal justice system* (Wicaksono, 2012). Penelitian sistem yang berkaitan dengan sistem Pemilu (Syam, 2003). Penelitian sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas bangsa (Haryanah, 2004). Penelitian tentang sistem ekonomi kerakyatan (Abbas dan Manan, 2005). Penelitian tentang sistem teknologi komunikasi dalam pemerintahan dan penanganan bencana alam (Sosiawan, dkk., 2013).

Penelitian tentang sistem pertahanan sosial daerah perbatasan di kota Batam (Asrinaldi dan Yoserizal, 2013). Penelitian sistem dan representasi politik identitas (Sosiawan dan Wibowo, 2015). Penelitian sistem bagi hasil *maro* dan solidaritas masyarakat (Wahyuningsih, 2011). Penelitian sistem budaya bahari komunitas nelayan di Nusa Tenggara Barat (Husain, 2011).

Penelitian tentang sistem komunikasi pernah dilakukan sebelumnya. Mis-

alnya penelitian tentang sistem komunikasi yang berkaitan dengan bencana, khususnya dalam keadaan tanggap darurat untuk mengurangi resiko bencana (Lestari, et al., 2013). Penelitian tentang aspek sistem (koordinasi, informasi, dan kerjasama) dalam komunikasi bencana (Budi, 2012). Penelitian tentang partisipasi warga terhadap sistem informasi desa (Sulistiyowati dan Dibyarin, 2013).

Penelitian tentang sistem komunikasi yang berkaitan dengan organisasi (Desautel, 2008); sistem komunikasi dalam kesehatan (Han, 2008); sistem komunikasi yang dimediasikan komputer/CMC (Holton, 2009); sistem komunikasi dalam kaitan dengan modal sosial (Handaka dkk., 2015); dan kompleksitas sistem komunikasi Pemerintah (Handaka dkk., 2016).

Tiap sistem komunikasi dijalankan oleh struktur komunikasi. Struktur senantiasa beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan mendorong struktur komunikasi untuk berubah seiring dengan arah kompleksitas tersebut. Sistem komunikasi Pemerintah adalah proses produksi dan reproduksi informasi budidaya kambing PE. Proses produksi dan reproduksi ini dijalankan oleh struktur komunikasi Pemerintah. Sistem komunikasi peternak adalah produksi dan reproduksi informasi budidaya kambing PE. Proses produksi dan reproduksi ini dijalankan oleh struktur komunikasi peternak. Struktur adalah kerangka organisasi, sedang sistem adalah fungsi dari struktur atau kerangka organisasi. Sistem komunikasi adalah fungsi dari struktur komunikasi Pemerintah dan peternak.

Penelitian tentang adaptasi struktur komunikasi penting dilakukan untuk melihat struktur komunikasi dalam menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Adaptasi struktur juga signifikan untuk menilai struktur beradaptasi atau merespon kompleksitas lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ada-

lah etnografi. Etnografi adalah penelitian lapang dengan deskripsi sangat terperinci dari sudut pandang “orang dalam” (Neuman, 2013; Denzin & Lincoln, 2009; Daymon & Holloway, 2005). Metode etnografi menempatkan pengalaman/peristiwa dalam konteks yang lebih bermakna (Jones & Arminio, 2006; Vanderstoep & Johnston, 2009; Savin-Baden & Major, 2010; O’Donoghue, 2007). Tahap penelitian etnografi dimulai dari: mendefinisikan cakupan masalah, mengumpulkan data etnografi, menyalin data, menganalisis data, menyusun kesimpulan untuk implikasi kebijakan atau praktis (Neergard & Ulhoi, 2007).

Batasan penelitian ini adalah adaptasi yang dikembangkan sistem komunikasi Pemerintah dan sistem komunikasi peternak dalam budidaya kambing PE di Kabupaten Purworejo. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive*, yaitu penilaian dan upaya cermat untuk memperoleh sampel representatif dengan cara meliputi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang diduga sebagai anggota sampelnya (Kerlinger, 2006). *Purposive sampling* juga digunakan untuk mendapatkan ragam perspektif dan pemahaman yang kaya (Belk, 2006). Informan adalah masyarakat yang peneliti dapat bicara dengan mudah, yang memahami informasi yang dibutuhkan peneliti, dan dengan senang hati memberi informasi atau mencarikannya untuk peneliti (Bernard, 2006).

Informan penelitian adalah ketua KJF, anggota KJF, staf Bidang Kesehatan Ternak DPPKP, koordinator BPK, mantan ketua BPK, Petugas Penyuluh Lapang (PPL), ketua poktan, dan ketua asosiasi peternak. Koordinator BPK diambil di 11 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada di Purworejo. Ketua poktan juga diambil 1 orang dari 11 Kecamatan. Sebelas Kecamatan ini merupakan sentra dan wilayah pendukung budidaya kambing PE. Informan ini dipilih karena memiliki informasi yang kaya tentang sistem komunikasi Pemerintah dan peternak. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 33 orang.

Pengambilan data adalah kolabo-

rasi peneliti dan informan untuk memproduksi deskripsi konteks sekitar dunia sosial, peneliti tidak sekedar mendapat deskripsi dunia sosial yang diwawancarai, lebih dari itu peneliti secara aktif mengelola untuk memproduksi deskripsi dengan yang diwawancarai (Bloor & Wood, 2006). Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Peneliti menyiapkan *interview guide* sebelum melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua dan anggota KJF serta Kepala dan staf Bidang Kesehatan Hewan di kantor DPPKP, wawancara dengan koordinator BPK dan PPL di kantor BPK, dan wawancara dengan peternak di rumahnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh latar alamiah (*naturalistic settings*) dari masing-masing informan.

Dalam observasi langsung, peneliti mengamati sesuatu secara langsung, seperti melihat bagaimana tingkah laku masyarakat di tempat tertentu (Rugg & Petre, 2007; Crang & Cook, 2007). FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sistem komunikasi dari perspektif yang lebih heterogen (Silverman, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptasi Sistem Komunikasi Pemerintah

Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE, beradaptasi dengan mendirikan BPPKP pada tahun 2008 seiring ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian. BPPKP kemudian dibubarkan oleh Bupati pada bulan Oktober 2013 dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyuluhan dilimpahkan ke KJF yang berada di bawah DPPKP.

Penyuluh BPPKP ditempatkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PPL pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan ditempatkan ke DPPKP yang digabung dalam satu wadah KJF. PPL kehutanan dan perkebunan ditempatkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang juga digabung dalam satu wadah KJF. Sementara BPK yang se-

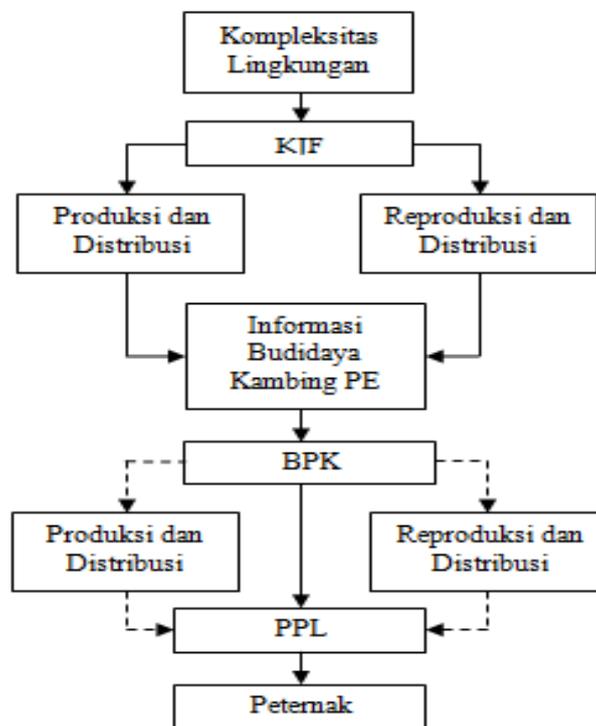
mula berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) berubah menjadi lembaga fungsional dan bukan struktural, sehingga tidak memiliki cap lembaga seperti saat masih menjadi UPT. BPK tidak lagi dipimpin ketua UPT, tetapi dipimpin oleh koordinator. Koordinator ini dipilih oleh anggota BPK, tidak ada hirarki dalam struktur BPK, antara ketua dan anggota memiliki kedudukan sama.

Setelah BPPKP dibubarkan, koordinasi penyuluhan juga berubah, awalnya dari Badan Koordinator Penyuluhan (Bakorluh) di Provinsi, kemudian turun ke Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) di Kabupaten, ke BPK dan terakhir ke Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes). Kemudian berubah dari Bakorluh ke DPPKP, kemudian ke KJF, terus ke BPK dan terakhir ke Posluhdes. Struktur komunikasi ini menjadi berputar karena Bappeluh/BPPKP sudah dibubarkan.

Perubahan struktur penyuluhan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Purworejo No. 821.2/4026/2013, dimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyulu-

han ada di struktur Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). Ketua KJF membawahi penyuluhan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. KJF juga berkoordinasi dengan BPK meskipun dalam struktur organisasi DPPKP, kedua struktur tersebut tidak memiliki garis hirarki.

Sistem komunikasi Pemerintah menghadapi kompleksitas lingkungan yang dinamis. Sistem komunikasi Pemerintah menyeleksi berbagai informasi dari kompleksitas lingkungannya. Informasi yang penting untuk sistem komunikasinya diproses untuk menjawab tekanan/tantangan lingkungan. Informasi ini juga yang menggerakkan sistem beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Sistem mendistribusikan pesan ke lingkungan dan mendapatkan *feedback* darinya. Sistem komunikasi Pemerintah dalam menyeleksi kompleksitas lingkungan, memproduksi dan mereproduksi informasi budidaya kambing PE dijelaskan dalam gambar 1:



Sumber: Handaka, 2016

Gambar 1
Sistem dan Struktur Komunikasi Pemerintah

Sistem komunikasi Pemerintah dijalankan oleh struktur KJF dan BPK. Menurut tupoksi-nya, KJF memproduksi dan mendistribusikan informasi budidaya kambing PE ke BPK. BPK meneruskan informasi tersebut ke peternak/poktan melalui PPL. PPL yang melakukan penyuluhan ke peternak akan mendapat umpan balik dari peternak. PPL BPK kemudian merekap persoalan/umpan balik peternak dan BPK meneruskannya ke KJF. Namun dalam kenyataannya, umpan balik peternak yang disampaikan BPK ke KJF sering tidak direproduksi menjadi informasi penyuluhan selanjutnya. Bila KJF mereproduksi informasi penyuluhan kadang sudah tidak sesuai dengan persoalan riil yang dihadapi peternak.

PPL BPK sering mencari informasi sendiri untuk menyelesaikan persoalan peternak. PPL mencari informasi melalui internet, buku, majalah, koran, atau dari PPL lain. BPK sering melakukan proses produksi dan reproduksi informasi untuk menyelesaikan persoalan peternak dalam budidaya kambing PE (ditunjukkan dalam garis putus-putus). BPK menilai KJF lambat dalam memproduksi dan mereproduksi informasi dalam budidaya kambing PE. Padahal tuntutan dan tantangan budidaya kambing PE sangat kompleks.

Kompleksitas lingkungan itu adalah permintaan pasar yang tinggi terhadap induk (jantan dan betina) kambing PE, baik pasar lokal, nasional dan internasional. Permintaan ini dibarengi dengan desakan ekonomi yang dihadapi peternak untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama biaya sekolah anaknya. Banyak peternak menjual induk kambing PE kualitas A ke pasar, lama-kelamaan cadangan/stok induk kualitas A di Purworejo menjadi berkurang. Bahkan banyak kambing PE kualitas A dibeli pedagang Malaysia.

Pemerintah dalam menghadapi persoalan ini, mulai menyeleksi informasi tentang latar belakang peternak yang menjual induk kualitas A ke pasar. Persoalan mendasar adalah kebutuhan peternak untuk membiayai kebutuhan sekolah anak, memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari dan kebutuhan besar lainnya. Sistem komunikasi Pemerintah memproduksi informasi ini dan membuat regulasi yang berisi larangan untuk menjual kambing PE kualitas A ke pasar. Peternak boleh menjual kambingnya tapi hanya ke peternak lain yang berada di Purworejo.

Regulasi ini ternyata tidak memberi dampak signifikan, masih banyak peternak yang tetap menjual kambingnya ke pasar. Peternak merasa bahwa regulasi itu tidak memiliki dasar dan melanggar hak peternak untuk menjual kambingnya. Pemerintah merasa kesulitan mengawasi lalu lintas penjualan kambing di pasar atau jual-beli langsung antara peternak dan pedagang. Pemerintah juga tidak bisa memberikan sanksi tegas bagi peternak yang menjual induk kambingnya.

Pemerintah juga membuat regulasi pendirian *Village Breeding Center* (VBC) di beberapa Kecamatan untuk meningkatkan jumlah induk kambing PE kualitas A. Pemerintah benar-benar mengkhawatirkan jumlah induk kambing PE kualitas A yang makin berkurang di Purworejo. Bila selama ini daerah lain selalu membeli kambing PE di Purworejo. Bukan tidak mungkin, bila cadangan induk kualitas A habis, maka giliran Purworejo yang akan membeli kambing PE ke daerah lain. Hal ini salah satunya ditandai dengan kontes kambing PE yang tidak lagi didominasi peternak Purworejo. Namun banyak peternak daerah lain yang mengikuti kontes kambing PE ini, seperti Malang, Trenggalek, Wonosobo, Kebumen, Banjarnegara, Tulungagung, Kediri, Blitar dan daerah lainnya. Juara umum juga sering diraih daerah luar Purworejo. Artinya, kambing PE kelas A tidak lagi hanya dimiliki peternak Purworejo, tapi sudah dimiliki daerah lain.

Keadaan ini menjadi umpan balik bagi Pemerintah untuk mereproduksi informasi berikutnya. Pemerintah mendistribusikan pesan tentang program insentif untuk peternak. Pemerintah akan membeli induk kambing PE kualitas A dari peternak. Regulasi ini juga masih sulit dilaksanakan, karena harga dari Pemerintah masih lebih rendah dari harga pasar. Kambing

PE kualitas A atau yang biasa mengikuti kontes, harganya mencapai ratusan juta rupiah. Pemerintah tentu tidak mampu untuk membeli kambing seperti ini. Peternak akhirnya menjual induk kambing ini ke pedagang.

Tantangan dan tuntutan lain dari lingkungan sistem komunikasi Pemerintah adalah diversifikasi budidaya kambing PE. Selama ini peternak hanya fokus untuk budidaya induk dan anak kambing. Peternak belum memperhatikan produksi susu dan pengolahannya. Pemerintah memproduksi informasi terkait pengolahan susu kambing PE ke peternak. Pemerintah menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh peternak ketika memerah dan menjual susu kambing. Harga susu kambing PE mencapai Rp. 25.000,-/liter pada tahun 2014-2015.

Peternak lalu memerah susu kambing PE, tapi mereka kemudian merasa kesulitan untuk menjual produk tersebut. Karena peternak kesulitan untuk menjual susu, akhirnya peternak tidak lagi memerah susu kambing PE. Peternak tetap menjual induk dan anak kambing. Peternak tidak tertarik memerah susu karena belum ada struktur pasar yang membeli produk tersebut. Sehingga peternak merasa lebih mudah menjual induk dan anak daripada susu kambing PE. Pemerintah perlu menyediakan struktur pasar atau koperasi untuk membeli susu kambing PE dari peternak.

Ketika Pemerintah masih berkuat dengan persoalan pemerahan susu kambing. Tantangan lingkungan sudah bergerak ke tahap produksi susu menjadi produk lain, misalnya susu bubuk, yoghurt, keju atau karamel. Bukan hanya itu, produk daging juga sudah mencapai tahap bukan sekedar menjual induk atau anak, tapi produk lain dari daging. Produk lain itu misalnya bakso daging kambing, nugget, petis, kecap dan kerupuk rambak serta penyamakan kulit. Selain itu, juga pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk.

Proses pengolahan produk kambing PE ini tentu membutuhkan teknologi. Kompleksitas lingkungan ini membutuhkan

jawaban segera dari Pemerintah. Peternak sangat membutuhkan teknologi atau bantuan dana untuk pengolahan kambing PE menjadi produk lain yang tidak kalah kompetitif dibanding produk berupa induk dan anak.

Tantangan lain sistem komunikasi Pemerintah adalah kerja penyuluhan yang didasarkan pada proyek kedinasan. Perspektif atau *mindset* DPPKP dan KJF yang masih bekerja sesuai dengan orientasi proyek adalah kompleksitas rutin. Sehingga program penyuluhan disesuaikan dengan logika proyek ini. Padahal penyuluhan memiliki falsafah sendiri, sedangkan proyek juga punya tujuan sendiri. Bila penyuluhan dipahami dalam domain proyek, maka filosofi penyuluhan akan hilang. Idealnya, proyek-lah yang seharusnya mengikuti kebutuhan penyuluhan. Karena penyuluhan adalah untuk mendidik masyarakat agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga bisa mandiri. Proyek hanya mendasarkan diri pada indikator capaian/target pekerjaan, seperti laporan kinerja (SPJ) saja.

Program penyuluhan idealnya disusun dari kebutuhan peternak/poktan, informasi ini kemudian diteruskan PPL ke BPK, dari BPK ke KJF. KJF bersama Bidang Peternakan di DPPKP memproduksi informasi untuk menjawab persoalan riil peternak. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu, justru malah sebaliknya. Logika proyek menyebabkan informasi sudah ditentukan dari DPPKP dan KJF kemudian didistribusikan ke BPK dan diteruskan ke peternak.

Alih-alih mengakomodasi kebutuhan riil peternak, KJF tiba-tiba memproduksi informasi dan peternak diminta menyesuaikan dengan informasi tadi. Proses ini tidak benar-benar memperhatikan tantangan dan persoalan yang dihadapi peternak. Penyusunan program penyuluhan yang dimulai dari atas ke bawah, tanpa memperhatikan tantangan yang dihadapi peternak, hanya akan menambah persoalan peternak.

DPPKP dan KJF memang dituntut harus bekerja sesuai dengan program

kerja/proyek yang sudah ditetapkan. Penyuluhan budidaya kambing PE disesuaikan dengan apa yang ada dalam *input* dan *output* program/proyek, kadang kurang memperhatikan kebutuhan riil peternak dalam budidaya kambing PE. Informasi ini mestinya menjadikan DPPKP dan KJF memroduksi regulasi untuk menjembatani masalah logika proyek dan kebutuhan riil peternak.

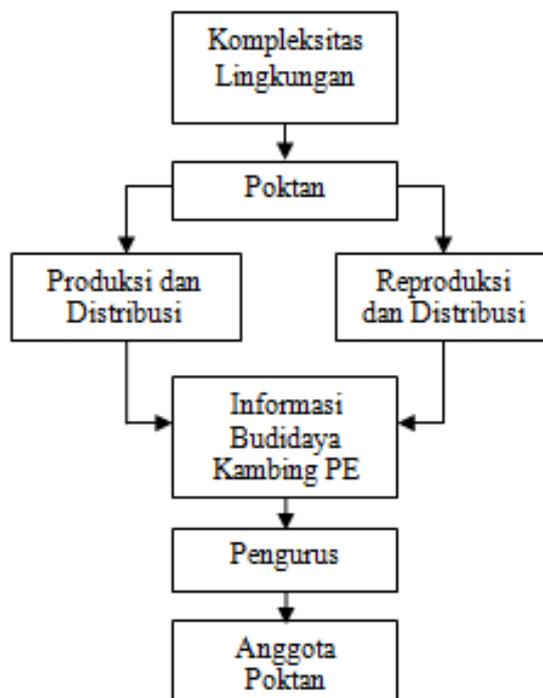
DPPKP dan KJF belum memroduksi informasi untuk proyek yang didasarkan pada kebutuhan/skala prioritas peternak. Produksi informasi seperti ini akan sangat optimal, karena peternak memang sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah dalam budidaya kambing PE. DPPKP dan KJF perlu mendesakkan informasi ini dalam mereproduksi logika proyek dan kebutuhan riil peternak.

Kompleksitas lain yang muncul dalam lingkungan sistem komunikasi Pemerintah adalah tuntutan PPL yang harus polivalen. Artinya PPL dituntut untuk menguasai semua bidang penyuluhan. PPL pertanian misalnya, sekaligus

juga menguasai bidang peternakan, kelautan dan perkebunan. Kompetensi PPL harus polivalen ini masih sulit diterapkan. Sebenarnya banyak PPL di KJF dan DP-PKP yang memiliki latar pendidikan sesuai dengan bidang penyuluhannya. Namun karena PPL senior ini lebih disibukkan dengan urusan administrasi dan jarang berkecimpung di lapangan, maka keahlian PPL ini lama-kelamaan menurun dan tidak berkembang.

Adaptasi Sistem Komunikasi Peternak

Sistem komunikasi peternak dijalankan oleh struktur poktan. Poktan adalah struktur komunikasi peternak yang menyeleksi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE. Kompleksitas lingkungan yang berupa tantangan dan tuntutan dalam budidaya kambing PE. Seluruh tuntutan dan tantangan lingkungan ini mendorong poktan untuk segera memberi jawaban. Sistem komunikasi peternak dalam menyeleksi informasi dari kompleksitas lingkungan dijelaskan dalam gambar 2:



Sumber: Handaka, 2016

Gambar 1
Sistem dan Struktur Komunikasi Peternak

Seperti ditunjukkan gambar 2, sistem komunikasi peternak berada di tengah kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE. Kompleksitas yang dihadapi poktan adalah populasi induk kualitas A yang semakin berkurang di kalangan peternak, diversifikasi budidaya kambing PE yang terus berkembang, pemasaran dan harga kambing yang fluktuatif, serta bantuan kambing PE dari Pemerintah. Poktan menyeleksi informasi dari kompleksitas lingkungan, lalu memproduksi dan mendistribusikan informasi budidaya kambing PE ke pengurus poktan, kemudian pengurus menyampaikannya ke anggota. Anggota memberikan umpan balik ke pengurus poktan, pengurus lalu menyampaikannya ke poktan. Poktan menggunakan umpan balik anggota untuk mereproduksi informasi selanjutnya. Kemudian pengurus poktan menyampaikan informasi tersebut ke anggota, ada umpan balik anggota poktan ke pengurus, ada reproduksi, demikian seterusnya.

Poktan dalam menghadapi persoalan populasi induk kambing PE kualitas A yang semakin berkurang dengan menetapkan dua aturan untuk semua anggotanya. Aturan pertama adalah melarang anggota menjual induk sebelum melahirkan anak dan menyusunya hingga cukup besar. Aturan kedua adalah mendorong anggota untuk membeli induk kambing PE ketika mendapat tabungan yang diberikan tiap tahun sekali.

Poktan membuat kegiatan iuran untuk anggota, yaitu iuran wajib dan sukarela. Iuran wajib ditentukan jumlah, waktu setor, dan pengambilannya. Sedang iuran sukarela tidak ditentukan jumlah dan bisa diambil setiap saat. Tabungan peternak yang diterima tiap tahun berasal dari iuran wajib ini.

Aturan yang diproduksi poktan efektif mengatasi populasi induk kambing PE yang semakin menurun. Induk kambing yang dijual tidak mengurangi populasi kambing PE yang dimiliki peternak karena sudah memiliki pengganti yaitu anaknya. Jumlah induk juga bertambah karena peternak membeli induk kambing PE tiap

tahun dengan tabungan yang disimpan di poktan. Populasi kambing PE yang dimiliki peternak/anggota poktan cenderung bertambah.

Tuntutan dan tantangan lingkungan budidaya kambing PE berikutnya yang dihadapi sistem komunikasi poktan adalah diversifikasi usaha. Budidaya kambing PE memiliki dua tujuan, yaitu produksi susu dan daging. Poktan dalam menghadapi persoalan ini belajar dari Perguruan Tinggi/Universitas, buku, studi banding, dan mempraktikkannya secara mandiri. Poktan telah berhasil mengolah susu menjadi susu bubuk, karamel, yoghurt, dan kerupuk. Poktan juga telah membuat kotoran kambing PE menjadi pupuk. Poktan membina kerjasama dengan pedagang/perusahaan dan poktan di daerah lain yang akan membeli produk-produk tersebut.

Selain itu, peternak juga mengembangkan kambing PE yang digunakan untuk kontes. Peternak kambing PE untuk kontes biasanya adalah para peternak dengan modal besar. Teknik budidaya kambing PE jenis ini sangat berbeda dengan kambing PE yang bukan kontes. Peternak mendapatkan teknik budidaya kambing PE kontes biasanya bukan dari PPL tapi dari internet, majalah, buku atau dari sesama peternak. Peternak mengembangkan teknik budidaya kambing PE kelas kontes secara mandiri. Para peternak juga bertukar informasi teknik budidaya kambing PE pada saat diadakan kontes.

Sistem komunikasi poktan dalam menghadapi persoalan pemasaran dan harga kambing yang fluktuatif dengan mengadakan kontes kambing PE. Kontes kambing PE terdiri dari beberapa kriteria penilaian. Kriteria penilaian kambing PE jantan meliputi kelas A, B, C, dan D. Kriteria penilaian kambing PE betina juga terdiri dari kelas A, B, C, dan D. Selain kedua kriteria penilaian jantan dan betina juga ada kambing PE perah.

Kontes kambing PE diadakan secara rutin oleh Asosiasi Peternak Kambing Peranakan Ettawa Nasional (ASPENAS). Kontes merupakan strategi untuk memasarkan atau mempromosikan kambing

PE dari berbagai kelas. Kambing PE yang memenangkan kriteria lomba di masing-masing kelas akan naik harganya. Peternak selalu mendapat tawaran pembelian dengan harga tinggi dari berbagai pihak ketika kambing PE miliknya menjuarai kontes. Kontes menjadi sarana poktan dan peternak untuk mengatasi persoalan pemasaran dan harga kambing PE yang fluktuatif.

Kontes yang awalnya diinisiasi ASPENAS ini, dalam perkembangan berikutnya mendapat bantuan dana dari Pemerintah hingga sekarang. Kontes yang diadakan ASPENAS dan DPPKP ini biasanya ditangani oleh *Event Organizer* (EO), DPPKP hanya menyediakan pendanaan. Seperti kontes kambing PE "Tarung Pasung" yang diadakan di *Summer Adventure Center* (SAC) di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo pada tanggal 17 Mei 2015. Kontes nasional kambing PE memang diselenggarakan secara bergiliran di berbagai daerah, tidak terusan menerus diadakan di Purworejo.

Selain kontes, poktan dalam menghadapi persoalan pemasaran dan fluktuasi harga juga mendirikan koperasi yang berbadan hukum. Anggota poktan bisa menabung dan meminjam dana koperasi untuk budidaya kambing PE atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Koperasi berperan dalam membantu peternak agar terhindar dari pinjaman berbunga/rentenir. Strategi iuran wajib dan sukarela yang diselenggarakan koperasi ini setidaknya mengurangi ketergantungan peternak dari Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan peternak oleh koperasi juga turut mengurangi penjualan induk kambing PE kualitas A ke luar daerah.

Peternak biasanya membutuhkan biaya besar ketika masa masuk sekolah. Peternak membutuhkan banyak dana untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Baik untuk kenaikan kelas atau masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kebutuhan akan biaya sekolah datang pada saat bersamaan. Sehingga peternak membutuhkan biaya sekolah anak secara bersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi,

peternak akan menjual kambing PE kualitas A ke pihak lain. Peternak yang menjual kambing PE secara bersamaan akan mengakibatkan harga turun.

Persoalan berikutnya yang dihadapi poktan adalah bantuan kambing PE dari Pemerintah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi poktan agar bisa mendapat bantuan kambing PE dari Pemerintah adalah berbadan hukum. Poktan menjawab persoalan ini dengan mengadakan urunan bagi semua anggota atau mengambil uang kas untuk mengurus status badan hukumnya ke Notaris. Banyak poktan yang sekarang sudah memiliki akta atau berbadan hukum dari Notaris. Badan hukum poktan menjadi syarat untuk mendapat bantuan kambing PE baik dari Pemkab, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

SIMPULAN

Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi masalah permintaan pasar yang tinggi terhadap induk kambing PE memproduksi regulasi yang melarang peternak menjual kambing PE kualitas bagus. Regulasi ini ternyata tidak relevan dalam menyelesaikan persoalan. Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi persoalan diversifikasi budidaya kambing PE menginisiasi pemerahan susu kambing. Namun sistem komunikasi Pemerintah tidak menyiapkan pasar, sehingga inisiasi ini tidak berhasil. Sistem komunikasi Pemerintah belum memproduksi informasi untuk menyelesaikan persoalan proyek kedinasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peternak. Semua produksi dan reproduksi informasi yang dibuat sistem komunikasi Pemerintah adalah adaptasi sistem, namun bukan evolusi menuju sistem adaptif (*adaptive system*). Sistem komunikasi Pemerintah sebaiknya lebih menekankan pada produksi dan reproduksi informasi budidaya kambing PE yang relevan dengan masalah riil peternak. Adaptasi yang dilakukan sistem komunikasi Pemerintah masih sering ditentukan oleh logika proyek. Sistem komunikasi Pemerintah harus mulai mencoba mengetahui kebutuhan dan persoalan peternak dan men-

sinergikan dengan logika proyek. Bila hal ini bisa terwujud, maka sistem komunikasi Pemerintah tetap bisa menjalankan rencana kerjanya sekaligus menjawab persoalan riil peternak. Sistem komunikasi poktan lebih cepat beradaptasi menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE. Poktan menginisiasi iuran wajib dan sukarela untuk menjawab persoalan populasi induk kambing PE kualitas A yang semakin turun. Poktan juga melakukan diversifikasi dengan mengolah susu menjadi produk lain. Poktan ketika menghadapi persoalan pemasaran dan fluktuasi harga kambing PE dengan mengadakan kontes dan mendirikan koperasi. Poktan beradaptasi dengan menjadikan dirinya berbadan hukum untuk menjawab kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE. Sistem komunikasi poktan berevolusi menjadi sistem adaptif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang telah membiayai penelitian ini melalui skema Penelitian Disertasi Doktor (PDD).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. dan Manan, W.K. 2005. Keterkaitan antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Mimbar* 21(3): 430-440.
- Asrinaldi dan Yoserizal. 2013. Ancaman terhadap Pengembangan Sistem Pertahanan Sosial Daerah Perbatasan di Kota Batam. *Jurnal Mimbar* 29(1): 1-10.
- Belk, R.W. 2006. *Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing*. Edward Elgar Publishing Limited. UK.
- Bernard, H.R. 2006. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. 4th Edition. Altamira Press. New York.
- Bloor, M. & Wood, F. 2006. *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts*. SAGE Publications Inc. California.
- Budi HH. 2012. Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi, dan Kerjasama). *Jurnal Komunikasi ASPIKOM* 1(4): 363-372.
- Crang, M. & Cook, I. 2007. *Doing Ethnographies*. SAGE Publications Ltd. California.
- Daymon, C. & Holloway, I. 2005. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Routledge. New York.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Diterjemahkan oleh Dariyatno dkk. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Desautel, C. 2008. Communication Systems in High Performing Servant-hood Cultures. *Dissertation*. Faculty of the School of Professional Studies. Gonzaga University.
- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo. 2012. *Profil Peternakan Kambing Kaligesing dan Peternakan Sapi di Kabupaten Purworejo*.
- Fuchs, S. 1999. Niklas Luhmann. *Journal of Sociological Theory* 17(1): 117-119. American Sociological Association.
- Hagen, R. 2000. Observing Luhmann. *Acta Sociologica* 43(1): 1-12. SAGE Publications Ltd.
- Handaka, T., H.I. Wahyuni, E. Sulastri, P. Wiryono. 2015. Social Capital and Communication Systems of E-tawa Goat Breeders in Purworejo Regency. *Komunitas: International*

- Journal of Indonesian Society and Cultural* 7(2): 307-315. UNNES.
- Handaka, T., H.I. Wahyuni, E. Sulastrri, P. Wiryono. 2016, The Complexity of Government Communication System in Ettawa Crossbred (EC) Goat Farming in Purworejo. *Mimbar: Social and Development Journal* 3(1): 88-96. UNISBA.
- Han, J.Y. 2008. Examining Effective Use of an Interactive Health Communication System (IHCS). *Dissertation*. Department of Mass Communication. University of Wisconsin. Madison.
- Hardiman, F. B. 2008. Teori Sistem Niklas Luhmann. *Jurnal Filsafat Driyarkara* 29(3): 1-15. Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.
- Haryanah, N. 2004. Rekonstruksi Sistem Pendidikan di Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Bangsa. *Jurnal Mimbar* 20(4): 540-554.
- Heriyadi, D. 2004. *Standardisasi Mutu Bibit Kambing Peranakan Ettawa*. Laporan Penelitian. Kerjasama antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran. Bandung, hal: 1-2.
- Holton, C.F. 2009. The Impact of Computer Mediated Communication (CMC) Systems Monitoring on Organizational Communications Content. *Dissertation*. Department of Mass Communication. University of Wisconsin. Madison.
- Husain, F. 2011. Sistem Budaya Bahari Komunitas Nelayan Lungkak Desa Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Komunitas* 3(1): 40-50.
- Jones, S.R., Torres, V. & Arminio, J. 2006. *Negotiating the Complexities of Qualitative Research in Higher Education: Fundamental Elements and Issues*. Routledge. New York.
- Kerlinger, F.N. 2006. *Foundation of Behavioral Research*. 3rd Edition. Diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- King, M. & Thornhill, C. (ed). 2006. *Luhmann on Law and Politics: Critical Appraisals and Applications*. Hart Publishing. Oxford.
- Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Purworejo. 2014. *Laporan Program Kerja*.
- Lee, D. 2000. The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann. *Journal of Sociological Theory* 8(2): 318-342. American Sociological Association.
- Lestari, P., Sembiring, I.D.P.Br., Prabowo, A., Wibawa, A. dan Hindarinigrum, R. 2013. Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10(2): 139-157.
- Leydesdorff, L. 2000. Luhmann, Habermas, and the Theory of Communication. *Journal of Systems Research and Behavioral Science* 17(3): 273 – 288.
- Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. 2008. *Theories of Human Communication*. 9th Edition. Thomson Wadsworth. California.
- Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (ed.). 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. SAGE Publications Inc. California.
- Luhmann, N. 1992. What is Communication. *Journal of the International Communication Association* 2(3):

- 251-259.
- Luhmann, N. 1995. *Social Systems*. Translated by John Bednarz Jr. with Dirk Baecker. Stanford University Press. Stanford.
- Luhmann, N. 2002. *Theories of Distinction: Redescribing the Description of Modernity*. Translated by Joseph O'Neil [et al.]. Stanford University Press. Stanford.
- Mahbubi, A. 2015. Sistem Dinamis Rantai Pasok Industrialisasi Gula Berkelanjutan di Pulau Madura. *Jurnal Agriekonomika* 4(2): 198-209.
- Neergard, H. & Ulhøi, J.P. (ed.). 2007. *Handbook of Qualitative Research Methods in Entrepreneurship*. Edward Elgar Publishing Limited. UK.
- Neuman, W.L. 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th Edition. Diterjemahkan oleh Edina T. Sofia. PT. Indeks. Jakarta.
- Ningsih, K., Felani, H., dan Sakdiyah, H. 2015. Keragaan Usaha Tani dan Pemasaran Buah Naga Organik. *Jurnal Agriekonomika* 4(2): 168-184.
- O'Donoghue, T. 2007. *Planning Your Qualitative Research Project: An Introduction to Interpretivist Research in Education*. Routledge. New York.
- Rasch, W. & Knodt, E.M. 1994. Systems Theory and the System of Theory. *New German Critique* 61(2): 3-7.
- Ritzer, G. 2012. *Sociological Theory*. 8th Edition. Dialihbahasakan oleh Saut Pasaribu dkk. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rugg, G. & Petre, M. 2007. *A Gentle Guide to Research Methods*. McGraw-Hill. New York.
- Savin-Baden, M. & Major, C.H. (ed.). 2010. *New Approaches to Qualitative Research: Wisdom and Uncertainty*. Routledge. New York.
- Silverman, D. 2007. *Qualitative Research: Theory, Method and Practice*. 2nd Edition. SAGE Publication. California.
- Sitorus, F.K. 2008. Masyarakat sebagai Sistem-Sistem *Autopoiesis*: Tentang Teori Sistem Sosial Niklas Luhmann. *Jurnal Filsafat Driyarkara* 29(3): 17-36.
- Sosiawan, E.A., Nugroho, A.R.B., Susilastuti, DN. 2013. Model Manajemen Teknologi Komunikasi dalam Pemerintahan dan Penanganan Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11(1): 1-16.
- Sosiawan, E.A. dan Wibowo, R. 2015. Representasi Politik Identitas dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13(3): 234-248.
- Stichweh, R. 2000. The Rise of "Communication" as a Theoretical Option. *Journal of Acta Sociologica* 43(1): 5-13.
- Sulistiyowati, F. dan Dibyorin, C.R. 2013. Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM* 2(1): 579-588.
- Syam, N.K. 2003. Mencari Format Sistem Pemilu yang Berkualitas. *Jurnal Mimbar* 19(1): 23-32.
- Vanderstoep, S.W. & Johnston, D.D. 2009. *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. Jossey-Bass. San Francisco.
- Viskovatoff, A. 1999. Foundations of Niklas

Luhmann's Theory of Social Systems. *Journal of Philosophy of the Social Sciences* 29(4): 481-516.

Von Groddeck, V. 2011. The Case of Value Based Communication – Epistemological and Methodological Reflections from a System Theoretical Perspective. *Journal of Historical Social Research* 36(1): 66-86.

Wahyuningsih, T. 2011. Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. *Jurnal Komunitas* 3(2): 197-204.

Wicaksono, D.A. 2012. Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri untuk Sinergitas Kinerja dalam *Integrating Criminal Justice System*. *Jurnal Makara: Sosial Humaniora* 16(2): 135-149.